

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Vicky. 2010. *Analisis Penggunaan Sistem Elektronik Pajak Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Gubeng*.
- Astuti, Inne Nidya. 2015. *Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. Universitas Negeri Surabaya*.
- Damayanti, Fitri, dan Achmad Fauzi. 2014. *Pengaruh Fasilitas Drop Box, E-Spt Dan E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepuasan Wajib Pajak*. *Akuntabilitas*. 8, (3), 225-237.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Undip.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-315/PJ.2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM Secara Online*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Miller, Lawrence M. 2013. *Getting to Lean - Transformational Change Management Paperback*.
- Moh. Zain. 2014. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Public: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang*

Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

puskakom.ui.ac.id.

Rahardjo, Mudjia. 2010. *Desain Penelitian Kualitatif dan Contoh Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Malang.

Sarunan, Widya K. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA. 3, (4), 518-526.

Sekaran, Uma. 2006. *“Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis”*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suandy. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui e-filing.

Tresno, Indra Pahala, dan Selvi Ayu Risky. 2012. *Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur)*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Tahun 1984 sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Widilestariningtyas, Ony, dan Gartina Wulan Utami. 2015. Penerapan e-filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal (Survey Pada WP OP Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Bandung Karees).

www.pajak.go.id.

